



Penyerahan LHP Kinerja Semester II TA 2019
Bengkulu Tengah dan Bengkulu Selatan
“Kurang Efektif” Kelola Dana Bidang Kesehatan

Bengkulu – Humas BPK

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Selatan “*Kurang Efektif*” dalam mengelola dana bidang kesehatan. Simpulan hasil pemeriksaan tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu, R. Aryo Seto Bomantari, pada saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019, di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, pada Selasa (31/12/2019).

LHP Kinerja tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu kepada Bupati Bengkulu Tengah, Ferry Ramli, dan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Evi Susanti, serta Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Barli Halim.

*“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan **KURANG EFEKTIF** dalam mengelola dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019” tegas Kepala Perwakilan.*

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada Semester II TA 2019, terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan dana bidang kesehatan, antara lain perencanaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi belum mendukung pelayanan dasar kesehatan; Puskesmas belum melaksanakan pelayanan kesehatan dasar secara optimal; DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2018 tidak terserap; DAK Non Fisik jaminan persalinan Tahun 2019 dimanfaatkan pasien peserta BPJS, dan mekanisme pengajuan UP dan GU pemanfaatan DAK Non Fisik pada Puskesmas tidak memadai.

Selain itu terdapat juga permasalahan tentang rencana pemanfaatan dana kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum disertai perhitungan skala prioritas dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya; Dinas Kesehatan belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan DAK untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar; dan perencanaan tenaga nusantara sehat belum mempertimbangkan pemerataan SDM.

Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan hal positif yang patut diapresiasi dalam pengelolaan dana bidang kesehatan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah berupaya mengelola dana bidang kesehatan secara optimal untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar berupa:

- a. Dana kapitasi yang tersedia di Puskesmas telah seluruhnya dialokasikan pemanfaatannya dalam RKA, DPA, dan APBD; dan
- b. Alokasi dana dari penerimaan DBH Pajak Rokok digunakan untuk Kegiatan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah berupaya mengelola dana bidang kesehatan secara optimal untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar berupa:

- a. Menerbitkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 440/158 Tahun 2019 yang berisi antara lain membagi porsi dana kapitasi menjadi 80% untuk jasa pelayanan dan 20% untuk dukungan operasional;
- b. Kegiatan yang bersumber dari DAK telah sesuai dengan kegiatan yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang kesehatan;
- c. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menganggarkan kegiatan yang bersumber dari selain dana kapitasi dan DAK Bidang Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan pendataan dan membuat rencana kebutuhan tenaga kesehatan pada seluruh Puskesmas melalui aplikasi RenBut.

Adapun Sasaran atau Lingkup Pemeriksaan Kinerja ini yaitu Pengelolaan Dana Kapitasi, Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan, Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan lainnya (selain Dana Kapitasi dan DAK Bidang Kesehatan) dalam APBD, dan Pengelolaan *dropping* barang dari APBN dan APBD Provinsi serta penempatan tenaga kesehatan (Nusantara Sehat).

Mengakhiri sambutan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu meminta Kepala Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. BPK berharap pemeriksaan BPK dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama yaitu terciptanya *clean and good governance* dapat segera terwujud. (***/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Contact Person:

Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Telp. (0736) 343233, Fax. (0736) 349348